



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP 2024

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan ukuran keberhasilan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mencapai Sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang didalamnya berisi mengenai capaian atas perjanjian kinerja Bagian Organisasi yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Salakan, 25 Maret 2025
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




HERMANTO MAR'UN, SP.MP
Pembina, IV/a
NIP. 19770930 200701 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat untuk merealisasikan kinerja yang harus dicapai suatu instansi. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini disusun. Laporan Kinerja ini merupakan satu kesatuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyajikan penetapan kinerja dan capaian kinerja dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran kinerja utama yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan “Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata”.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2024, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja Bagian Organisasi di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kegiatan pada Bagian Organisasi di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2024 dapat dikatakan Memuaskan. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2024.

Pengukuran kinerja Bagian Organisasi terdiri dari 4 sasaran dengan 6 indikator yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%
	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%
Tersedianya LKjIP yang berkualitas	Pelaporan Kinerja SAKIP	100%
Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran	Nilai evaluasi kelembagaan dan Tingkat kematangan kelembagaan	19,1 (Rendah)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,01 (A /Sangat Baik)
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88,00 (A /Sangat Baik)

Secara umum capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan tren positif, dan memuaskan .

Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh staf dan Sub Bagian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang

terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Banggai Kepulauan yang amanah, maju dan Sejahtera.

Semoga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Bagian Organisasi	2
a. Susunan Struktur Organisasi Bagian Organisasi	3
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
c. Struktur Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	6
d. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
1.4 Isu Strategis	8
1.4.1 Isu Strategis Bagian Organisasi	8
1.4.2 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	11
2.4 Prioritas dan Sasaran Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024	12
2.4 Rencana Kerja 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Pengukuran kinerja	14
3.2 Capaian Kinerja.....	16
3.2.1 Sasaran 1 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	16
3.2.2 Sasaran 2 Tersedianya LKjIP yang berkualitas.....	17
3.2.3 Sasaran 3 Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran.....	19
3.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	20
3.3 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, salah satunya dapat diukur melalui penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintahdaerah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

1.2 Gambaran Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan No 34 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Susunan Bagian Organisasi, Tugas dan Fungsi.

a. Susunan Struktur Organisasi Bagian Organisasi

1. Kepala Bagian Organisasi
2. Sub Bagian Analisis Jabatan dan kelembagaan
3. Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja
4. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai

tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- c. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan Perangkat Daerah;
- d. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
- e. menyusun Standar Kompetensi Jabatan;
- f. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- g. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
- h. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
- c. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- e. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- c. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- d. menyusun road map reformasi birokrasi;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

c. Struktur Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebanyak 5 orang PNS, 4 Orang PPPK dan 5 Tenaga Kontrak Daerah :

Tabel. 1.1

Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan:

No.	PNS	PPPK	TKD	Jumlah
1.	5 orang	4 orang	5 orang	14 Orang

Tabel 1.2

Jumlah PNS berdasarkan golongan :

No.	Gol/ Ruang	Jumlah
1.	IVa	2
2.	IIId	1
3.	IIId	-
4.	IIId	2
5.	IIId	-
	Total	5

Tabel. 1.3

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	2
4.	D2	-
5.	D3	1
6.	S1	9
7.	S2	2
	Jumlah	14

Tabel. 1.4

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	11
2.	Perempuan	3
	Jumlah	14

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan kinerja Organisasi karena dampaknya yang signifikan bagi unit kerja dengan karakteristik bersifat penting, mendasar mendesak, berjangka menengah / panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan kinerja Bagian Organisasi di masa yang akan datang.

1.4.1 Isu Strategis Bagian Organisasi

Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi capaian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024. Rumusan isu strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- 1) Peran dan fungsi Lembaga/Organisasi Pemerintah belum optimal
- 2) Penerapan Reformasi Birokrasi yang belum maksimal
- 3) Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel.

1.4.2 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan kinerja Bagian Organisasi Tahun 2024, LKjIP Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LKjIP Tahun 2024 berupa Keadaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kewenangan, Tugas Pokok Organisasi serta Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan Dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Isu-isu Strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai. serta Rencana Kinerja Tahun 2024, sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 terkait dengan tugas pokok dan tugas- tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang ada. Rencana strategis OPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas.

Analisis isu - isu strategis merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu – isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Olehnya itu, maka rumusan misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2019-2024 seperti berikut seperti yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2003-2026 yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance), peran dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”

Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Good governance dapat dipahami, bahwa

Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif; tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif; musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan.

Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Prioritas dan Sasaran Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Prioritas dan sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Prioritas dan sasaran Bagian Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	SUB BAGIAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%	Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja
	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%	
Tersedianya LKJIP yang berkualitas	Pelaporan Kinerja SAKIP	100%	
Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran	Nilai evaluasi kelembagaan dan Tingkat kematangan kelembagaan	19,1 (Rendah)	Sub Bagian Analisis Jabatan Dan kelembagaan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,01 (A /Sangat Baik)	Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88,00 (A /Sangat Baik)	

2.4 Rencana Kerja 2024

Rencana kerja Tahun 2024 Bagian Organisasi merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan dan Pengukuran kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu terdiri 4 sasaran dengan 6 indikator yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 seperti pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	SUB BAGIAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%	Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja
	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%	
Tersedianya LKjIP yang berkualitas	Pelaporan Kinerja SAKIP	100%	
Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran	Nilai evaluasi kelembagaan dan Tingkat kematangan kelembagaan	19,1 (Rendah)	Sub Bagian Analisis Jabatan Dan kelembagaan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,01 (A /Sangat Baik)	Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88,00 (A /Sangat Baik)	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang. Skala pengukuran kinerja dipergunakan dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, dengan menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran:

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala penilaian progres positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Memuaskan
3	75% sampai 100%	Memuaskan
2	55% sampai 75%	Cukup Memuaskan
1	Kurang dari 55%	Kurang Memuaskan

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala penilaian progres negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang Memuaskan
2	75% sampai 100%	Cukup Memuaskan
3	55% sampai 75%	Memuaskan
4	Kurang dari 55%	Sangat Memuaskan

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini akan dijelaskan capaian Kinerja Bagian Organisasi secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Kinerja/Indikator Sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024 (%)	NILAI
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General	-	100%	100%	100%	Memuaskan
	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	-	100%	100%	100%	Memuaskan
Tersedianya LKjIP yang berkualitas	Pelaporan Kinerja SAKIP	-	100%	100%	100%	Memuaskan
Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran	Nilai evaluasi kelembagaan dan Tingkat kematangan kelembagaan	-	19,1 (rendah)	16,40 (sangat rendah)	86%	Memuaskan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	-	4,01 (A /Sangat Baik)	3,8 (B / Baik)	95%	Memuaskan
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	88,00 (A /Sangat Baik)	87,09(B / Baik)	99%	Memuaskan

Keterangan Warna :

 = Sangat Memuaskan

 = Memuaskan

 = Cukup Memuaskan

 = Kurang Memuaskan

Indikator Sasaran Kinerja yang mendukung sasaran strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) indikator, dan semua indikator mencapai kriteria **Memuaskan**

3.2 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan Tahun 2024 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran 1 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak

Analisis pencapaian Tujuan 1 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.4 Capaian Sasaran I

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	1	Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%		100%	100%

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
	2	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	100%		100%	100%

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu persentase Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General kategori capaian **memuaskan** dan Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General juga mendapat capaian **memuaskan**.

3.2.1.2 Analisis penyebab keberhasilan.

Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja yang bertanggung jawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General dan Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General, terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh kerja sama yang baik antar OPD dalam penyusunan Rencana Aksi serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah, sehingga sasaran Organisasi terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak dapat tercapai sesuai target.

3.2.1.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Pembangunan RB General dan Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General adalah sebesar Rp 375,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 359,615,680 atau sekitar 95,90%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 4,10%. Anggaran Ini juga sudah termasuk dengan anggaran pencapaian pada Sasaran 2 yaitu tersedianya LKJIP yang berkualitas.

3.2.2 Sasaran 2 Tersedianya LKjIP yang berkualitas

Analisis pencapaian sasaran 2 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.5 Capaian Sasaran 2

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Tersedianya LKjIP yang berkualitas	1	Pelaporan Kinerja SAKIP	100%		100%	100%

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Pelaporan Kinerja SAKIP telah mencapai target dengan Predikat ***memuaskan***

3.2.2.2 Analisis penyebab keberhasilan

Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja yang bertanggung jawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Pelaporan Kinerja SAKIP, terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh kerja sama yang baik antar OPD dalam penyediaan data dan dokumen pendukung dalam penyusunan pelaporan Kinerja SAKIP, sehingga sasaran Organisasi tersedianya LKjIP yang berkualitas dapat tercapai sesuai target.

3.2.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Pelaporan Kinerja SAKIP sudah termasuk didalam Anggaran untuk pencapaian Sasaran 1 yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak, sebesar Rp 375,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 359,615,680 atau sekitar 95,90%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 4,10%.

3.2.3 Sasaran 3 Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran
 Analisis pencapaian sasaran 3 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.6 Capaian Sasaran 3

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran	1	Nilai evaluasi kelembagaan dan Tingkat kematangan kelembagaan	19,1(rendah)		16,4(sangat rendah)	86%

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Nilai evaluasi kelembagaan dan Tingkat kematangan kelembagaan belum mencapai target, hanya mencapai kategori ***memuaskan***.

3.2.3.2 Analisis penyebab kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sub Bagian Analisis Jabatan dan kelembagaan merupakan sub bagian yang dibebankan target pada sasaran ini. Belum tercapainya target indikator Nilai evaluasi kelembagaan dan tingkat kematangan kelembagaan disebabkan faktor pemenuhan dokumen dan nilai variabel dari seluruh OPD yang sangat rendah.

Evaluasi dan perbaikan rencana kinerja sangat perlu Pembinaan dan pengendalian kepada seluruh Perangkat Daerah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Nilai evaluasi kelembagaan dan tingkat kematangan kelembagaan adalah Rp 229,280,720 dan terealisasi sebesar 224,964,160 atau sebesar 98.12 % artinya terdapat efisiensi sebesar 1,88%.

3.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Analisis pencapaian sasaran 4 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.4.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.7 Capaian Sasaran 4

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Pelayanan Publik	4,01 (A /Sangat Baik)		3,8 (B / Baik)	95%
	2	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88,00 (A /Sangat Baik)	57,33 (C / Cukup)	87,09(B / Baik)	99%

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana adalah pelaksana dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

- Indeks Pelayanan Publik kategori **memuaskan**
- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kategori **memuaskan**.

3.2.4.2 Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Indeks Pelayanan Publik

Pencapaian indikator ini terealisasi dengan kategori memuaskan. Hal ini didukung oleh meningkatnya pelayanan kepada masyarakat oleh OPD pelayanan publik.

b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pencapaian indikator ini juga terealisasi dengan kategori memuaskan. Hal ini didukung oleh tingkat kepatuhan OPD pelayanan masyarakat kepada Standar Pelayanan Publik yang sudah di tetapkan.

3.2.4.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang diberikan untuk pencapaian Indikator Indeks Pelayanan Publik dan Indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah Rp. 157,520,600 dan terealisasi sebesar 155,353,780 atau sebesar 98.62% artinya terdapat efisiensi sebesar 1.38%

3.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2024, dan realisasinya berdasarkan data, adalah sebagai berikut:

Anggaran Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN ORGANISASI
PROGRAM : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
SUB KEGIATAN : 4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.950.000,00	Rp4.950.000,00	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp16.310.500,00	Rp16.310.500,00	Rp16.310.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.310.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.119.500,00	Rp4.119.500,00	Rp4.109.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.109.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp40.240.000,00	Rp40.240.000,00	Rp40.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.977.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.977.000,00	Rp11.023.000,00	Rp11.023.000,00
7	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp31.200.000,00	Rp31.200.000,00	Rp31.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp78.380.000,00	Rp78.380.000,00	Rp73.828.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.828.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.351.320,00	Rp4.351.320,00
10	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Sumber : DPA 2024

Anggaran Sub Bagian Anjab dan Kelembagaan 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN ORGANISASI
PROGRAM : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
SUB KEGIATAN : 4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	Rp11.490.000,00	Rp11.490.000,00	Rp11.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp720.000,00	Rp720.000,00	Rp710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp15.420.000,00	Rp15.420.000,00	Rp15.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
5	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
6	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp29.820.000,00	Rp29.820.000,00	Rp29.772.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.772.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000,00	Rp48.000,00
8	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp86.750.000,00	Rp86.750.000,00	Rp83.096.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.096.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.653.550,00	Rp3.653.550,00
9	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp23.400.000,00	Rp23.400.000,00	Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00
11	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp10.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.000,00	Rp315.000,00

Anggaran Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata laksana

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN ORGANISASI
 PROGRAM : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 KEGIATAN : 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
 SUB KEGIATAN : 4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp19.130.000,00	Rp19.130.000,00	Rp19.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.180.000,00	Rp1.180.000,00	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.880.000,00	Rp6.880.000,00	Rp6.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp21.120.000,00	Rp21.120.000,00	Rp21.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp63.710.000,00	Rp63.710.000,00	Rp61.543.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.543.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.166.820,00	Rp2.166.820,00
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran.
2. Mengupayakan program dan kegiatan pada bagian Organisasi agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat skala nilai kinerja tinggi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bagian Organisasi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian yang lebih baik.

Salakan, 25 Maret 2025
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



HERMANTO MAR'UN, SP.MP
Pembina, IV/a
NIP. 19770930 200701 1 012

